MANAJEMEN BERBASIS SEKLAH DI UPTD SPNF SKB KOTA SALATIGA

Muflikah, Noormiyono
[1,2]UPTD SPNF SKB Kota Salatiga
muflikah95457@gmail.com

ABSTRACT

Centralized education does not train school leadership to be more independent and in terms of administration, teacher professionalism, institutional development, development curriculum, provision of teaching aids, allocation of funds and especially increasing community involvement to increase school ownership. Objectives Based on this research, it is determined that school management-based development is important for schools. This research method is a literature review. The research results were obtained by looking for similarities in several articles and then drawing conclusions. The results and impact of implementing SBM on optimal performance, learning, learning resources and professionalism of teachers and school management systems are known. Through SBM, as a result, there is greater community and parent participation, school principals can become more democratic, professional and competent in forming integrated teams in preparing, implementing and evaluating school activity programs. In implementing MBS. The conclusion is to make quality training more effective, so that our nation can also achieve excellence. Conclusion: The results of implementing SBM cannot be achieved in all schools equally. But all schools have the same acceptance of quality schools.

Keywords: School Based Management

ABSTRAK

Pendidikan terpusat tidak melatih kepemimpinan sekolah lebih mandiri dan dalam hal administrasi, profesionalisme guru, pengembangan lembaga, pengembangan kurikulum, penyediaan alat peraga, alokasi dana dan khususnya meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk meningkatkan kepemilikan sekolah. Tujuan Berdasarkan penelitian ini maka ditentukan pembangunan yang berbasis manajemen sekolah penting untuk sekolah. Metode penelitian ini adalah tinjauan pustaka. Hasil penelitian diperoleh dengan mencari persamaan pada beberapa artikel lalu digambar kesimpulan Diketahui hasil dan dampak penerapan MBS kinerja, pembelajaran, sumber belajar dan profesionalisme yang optimal guru dan sistem manajemen sekolah. melalui MBS alhasil, besarnya partisipasi masyarakat dan orang tua, kepala sekolah sekolah dapat menjadi lebih demokratis, profesional dan kompeten membentuk tim terpadu dalam persiapan, pelaksanaan dan mengevaluasi program kegiatan sekolah. Dalam penerapannya MBS. Kesimpulanya adalah membuat pelatihan menjadi lebih efektif berkualitas, sehingga bangsa kita juga bisa meraih keunggulan Kesimpulan: Hasil pelaksanaan MBS tidak dapat dicapai di semua sekolah Sama. Tapi semua sekolah memiliki penerimaan yang sama sekolah yang berkualitas.

Kata Kunci: Manajemen Berbasis Sekolah

A. Pendahuluan

Pendidikan di Indonesia dimulai dengan sistem pendidikan pesantren tradisional, kemudian dilanjutkan dengan sistem pendidikan masa kolonial. Sejak awal kemerdekaan, pendidikan bersifat terpusat, dirancang sebagai pendidikan umum (Saberan dan Erni, 2019). Pendidikan merupakan hal yang sangat penting saat ini, karena merupakan bagian strategis dalam membangun kehidupan suatu negara. Sistem pendidikan yang berkualitas dapat dibangun melalui kepemimpinan yang profesional (Sutisna, 2017).

Proses manajemen pendidikan pada satuan pendidikan apapun menitikberatkan pada kualitas lulusan, namun tidak mungkin suatu pendidikan atau sekolah menghasilkan lulusan yang berkualitas jika tidak mengalami pembelajaran yang berkualitas (Sutisna, 2017). Pendidikan yang terpusat tidak menumbuhkan kepemimpinan sekolah untuk kepemimpinan yang lebih mandiri, pengembangan profesional guru, pengembangan kelembagaan, pengembangan kurikulum, penyediaan sumber belajar, alokasi sumber daya, dan terutama partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kepemilikan sekolah.

Keberhasilan sekolah sebagai lembaga formal yang berperan sebagai perawat kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh sistem tata kelolanya (Mulyadi dkk, 2021). Salah satu cita-cita sekolah adalah menerapkan MBS untuk mewujudkan sekolah efektif. Dalam MBS, partisipasi masyarakat melalui kepala sekolah dan guru merupakan hal yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, seluruh kegiatan sekolah mencakup keuangan, pembelajaran, infrastruktur dan berbagai komponen yang mendukung kelancaran.

Mengajar adalah tanggung jawab sekolah, yang disetujui oleh masyarakat. Dengan kata lain, komite sekolah menentukan seluruh kebijakan dan program sekolah dengan berkonsultasi dengan otoritas pendidikan daerah, kepala sekolah, guru, perwakilan orang tua siswa, tokoh masyarakat dan pemerintah daerah dimana sekolah tersebut berada (Pratiwi, 2016).

MBS Merupakan paradikma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah dengan maksud agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikan sesuai

dengan prioritas kebutuhan (Saberan dan Erni, 2019). Pada sistem MBS sekolah dituntut secara mandiri menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, mengendalikan, dan mempertanggungjawabkan pemberdayaan sumber-sumber, baik kepada masyarakat maupun pemerintah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perkembangan manajemen berbasis sekolah yang signifikan terhadap sekolah.

MBS merupakan paradigma baru pendidikan yang menawarkan otonomi luas di tingkat sekolah dengan tujuan memberikan kebebasan kepada sekolah dalam mengelola sumber daya dan sumber keuangan, mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan (Saberan dan Erni, 2019). Dalam sistem MBS, sekolah harus secara mandiri meneliti, mengalokasikan, memprioritaskan, mengelola dan bertanggung jawab untuk meningkatkan sumber daya baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan manajemen sekolah yang penting bagi sekolah.

UPTD SPNF SKB Kota Salatiga merupakan salah satu lembaga pendidikan nonformal yang ada di Salatiga. UPTD SPNF SKB Kota Salatiga menerapkan sistem MBS. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas satuan pelatihan. UPTD SPNF SKB MBS Kota Salatiga tercermin dalam delapan standar SNP, yaitu kurikulum, peserta didik, guru dan pendidik, sarana dan prasarana, keuangan, hubungan sekolah dan masyarakat, serta budaya dan lingkungan. Sistem MBS UPTD SPNF SKB Kota Salatiga menyelenggarakan seluruh fungsi fasilitas.

Prinsip kelembagaan misalnya prinsip fleksibilitas, prinsip partisipasi, dan prinsip inisiatif. Prinsip fleksibilitas dapat dilihat ketika mempelajari program ekuitas. Sekolah menentukan pembelajaran keterampilan berdasarkan kemampuan sumber daya satuan pendidikan, serta sumber daya manusia dan sarana prasarana. Prinsip keikutsertaan UPTD SPNF SKB Kota Salatiga tercermin pada program SSB dan PAUD.

Dalam kedua program tersebut, masyarakat dilibatkan dalam komite sekolah. Dalam program PAUD, komite sekolah berperan aktif dalam memberikan saran dan masukan dalam menentukan program kegiatan satuan pendidikan yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut. Di

akhir program, panitia memberikan saran dan komentar terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan, sehingga dapat dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan di tahun-tahun mendatang. Prinsip inisiatif diri dapat dilihat pada karyawan kami. Tutor berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seperti lokakarya dan pelatihan untuk mengembangkan kemampuan tutor dalam memenuhi tanggung jawabnya.

Kajian Teori

Pengertian, Tujuan, dan Manfaat Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Myers dan Stonehill mengemukakan, MBS adalah strategi untuk memperbaiki pendidikan dengan mentransfer otoritas pengambilan keputusan secara signifikan dari pemerintah pusat dan daerah ke sekolah-sekolah secara individual dengan memberi kepala sekolah, guru, siswa, orangtua dan masyarakat untukmemiliki kontrol yang lebih besar dalam proses pendidikan dan memberikan mereka tanggungjawabtentang dana, personel dan kurikulum (Pratiwi, 2016).

Di Indonesia, MBS diterapkan sejalan dengan otonomi daerah. Pemahaman otonomi daerah di Indonesiadilandaskan pada kebijakan publik tentang otonomi daerah yaitu Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajibandaerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penerapan MBS bertujuan untuk menyeimbangakan struktur kewenangan antar sekolah, pemerintah daerah pelaksana proses dan pusat sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah, baik dalam proses yang terkait dengan layanan maupun hasil (Mulyadi, dkk, 2021). Menurut Marsidin (2019) dan juga menurut Pedoman Akreditasi Sekolah (2020) bahwa kualitas sekolah yang peringkatnya A menunjukkan berkualitas unggul, peringkatnya B berkualitas baik, dan C berkualitas cukup baik, selain itu ada pula sekolah yang peringkatnya TT (Tidak Terakreditasi). Sekolah yang TT dapat karena ketika melaksanakan akreditasi tidak mampu meraih nilai akreditasi minimal sekalipun, dan dapat pula karena belum

melaksanakan akreditasi walaupun secara operasional mendapatkan ijin penyelenggaraan dari pejabat yang berwenang (Mulyadi, dkk, 2021).

MBS memberikan keleluasaan pengelolaan sekolah yang memiliki potensi besar dalam menciptakan sumber daya profesional yang terdiri dari kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi. Oleh karena itu, dalam melaksanakan MBS perlu seperangkat kewajiban dan tuntutan pertanggungjawaban (akuntabilitas) yang tinggi kepada masyarakat (Saberan & Erni, 2019). Soemidiharjo menyatakan bahwa terdapat tiga pilar utama yang menjadi syarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu 1) adanya transparansi dalam menetapkan kebijakan dengan menerima masukan dan mengikuti sertakan berbagai institusi; 2) adanya standar kinerja yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang; dan 3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah, dan pelayanan yang cepat (Seriyanti, dkk, 2021).

Masalah yang dihadapi dunia pendidikan saat ini seperti masalah lulusan, pembelajaran, pemberian layanan, peningkatan kompetensi guru dan masalah profesionalisme serta kinerja guru (Sutisna, 2017). Purwanto (2016) melihat bahwa Kepala Sekolah melalui kepemimpinannya sebagai penentu kualitassekolah. Sutisna (2017) mengemukakan dua strategi yang diterapkan untuk menjawab tantangan di lapangan, yaitu yaitu, a) menerapkan pola kemitraan Kepala Sekolah dengan Komite Sekolah dalammenentukan Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah, b) Penerapan konsep Manajemen Berbasi Sekolah (MBS) untuk mewujudkan sekolah yang efektif dan efisien. Terdapat 4 prinsip yang harus dipahami dalam mengimplementasikan MBS yaitu kekuasaan, pengetahuan, sistem informasi, dan sistem penghargaan (Saberan & Erni, 2019).

Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Tujuan umum MBS adalah meningkatkan kemandirian sekolah melalui pemberian kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sumber daya sekolah, dan mendorong keikutsertaan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan mutu sekolah (Kemdikbud, 2013: 13).

Menurut Prihatini tujuan MBS adalah meningkatkan kualitas pendidikan secara umum baik itu menyangkut aktivitas pembelajaran kualitas kurikulum kualitas sumber daya manusia baik guru maupun tenaga pemberita lainnya dan kualitas pelayanan pendidikan secara umum (2020: 7).

Sedangkan menurut Nurcholis secara singkat mengemukakan bahwa tujuan utama MBS adalah meningkatkan kinerja sekolah dan terutama meningkatkan kinerja belajar siswa menjadi baik. Tinjauan tujuan MBS tersebut dapat dikatakan bahwa orientasi utama MBS adalah meningkatkan mutu pendidikan baik dalam proses maupun hasil pendidikan. Lebih rinci tujuan MBS dikemukakan dalam buku MBS SMA yang diterbitkan oleh Direktorat pembinaan SMA Dirjen Dikdasmen Kemdikbud (2018: 3) adalah sebagai berikut.

a. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang.
b. Meningkatkan kepedulian wargasekolah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama.
c. Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua masyarakat dan pemerintah tentang mutu sekolahnya.
d. Meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai.

B. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:440-441) menyatakan bahwa teknik triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik yang ada dan sumber data yang ada. Maka sebenarnya peneliti telah melakukan pengujian kredibilitas data sekaligus mengumpulkan data. Menurut Sugiyono Triangulasi dibagi menjadi 3 yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Sumber-sumber untuk pemerolehan datanya didapatkan dari buku-buku yang tersedia di perpustakaan kampus dan artikel melalui web seperti Google scholar, dan Researchgate.

Data-data yang sudah

dikumpulkan kemudian dicatat mengenai nama penulis, tahun terbit, lokasi penelitian, subjek, tujuan penelitian, metode penelitian dan hasil penelitian. Setelah melakukan hal tersebut, maka selanjutnya menganalisis artikel satu dengan yang lainnya kemudian menyajikan datanya dalam bentuk sebuah artikel.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

MBS adalah manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif untuk memenuhi tujuan mutu sekolah dalam kerangka pendidikan nasional. Perubahan-perubahan tingkah laku kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi dalam mengelola sekolah merupakan syarat utama dari keberhasilan pelaksanaan MBS. Implementasi MBS secara benar akan memberikan dampak positif terhadap perubahan tingkah laku warga sekolah yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah.

Penerapan pengelolaan pendidikan dengan model MBS bertujuan untuk Peningkatkan efisiensi,mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi terutama diperoleh dari keleluasaan yangdiberikan untuk mengelola sumber daya partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi.

Peningkatan mutu dapat diperoleh antara lain melalui partisipasi orang tua terhadap sekolah, leksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah, serta pemberlakukan sistem insentif dan disentif. Peningkatan pemerataan dapat diperoleh melalui peningkatan partisipasi masyarakat yang memungkinkan pemerintah untuk lebih berkonsentrasi pada kelompok tertentu. Hal ini dimungkinan karena pada sebagian masyarakat tumbuh rasa kepemilikan yang tinggi terhadap sekolah.

Sosialisasi implementasi MBS tidak dilakukan dalam forum khusus, seperti lokakarya, workshop, seminar dan pelatihan pelatihan. Namun demikian kepala sekolah selalu mencoba menerapkan prinsip-prinsip utama MBS, yakni otonomi sekolah dan partisipasi warga sekolah dalam pengambilan dan pelaksanaan keputusan. Hal ini sangat penting karena keberhasilan dalam sosialisasi akan menentukan keberhasilan

langkah-langkah implementasi MBS selanjutnya.

Sosialisasi implementasi MBS harus dilakukan secara tegas dan jelas tidak hanya kepada warga sekolah, tetapi juga secara vertikal kepada pemerintah yang terkait sehingga semua pihak akan memberi perhatian dan dukungan yang lebih besar. Kepala sekolah harus mempersiapkan seluruh SDM yang ada agar paham dan mampu menerapkan MBS dengan sebaik-baiknya, baik melalui diskusi, seminar, studi banding dengan sekolah lain, membaca buku tentang MBS ataupun dengan mengirim para staf untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tentang MBS. Kepala sekolah dan komite sekolah hendaknya membuat kebijakan-kebijakan baru yang dapat meningkatkan peran serta masyarakat atau wali murid dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. Faktor-faktor penghambat dan pendukung implementasi MBS Ada beberapa hambatan yang dialami oleh sekolah dalam implementasi MBS, yakni antara lain: kurangnya sosialisasi, minimnya buku-buku referensi tentang MBS dan kepala sekolah.

Adapun yang mendukung implementasi MBS di UPTD SPNF SKB Kota Salatiga adalah adanya pelimpahan wewenang atau otonomi yang lebih besar dari wali murid kepada kepada sekolah serta pemerintah memberikan bantuan dana bantuan operasional pendidikan (BOP) untuk penambahan biaya operasional di sekolah. Kemauan sekolah untuk selalu memperbaiki citranya di mata masyarakat juga merupakan modal utama yang sangat mendukung implementasi MBS, dukungan dari warga sekolah mulai tumbuh baik mulai dari para wakil kepala sekolah, dewan guru maupun staf dan komite sekolah.

Upaya peningkatan mutu pendidikan merupakan tugas yang cukup berat, untuk itu semua komponen baik masyarakat maupun pemerintah harus bersama-sama mengupayakan layanan pendidikan yang efektif. Sebagaimana upaya pemerintah berusaha memperbaiki kurikulum dari waktu ke waktu, penyesuaian metode pembelajaran, peningkatan sarana dan prasarana, pengadaan buku yang berkualitas, peningkatan kualitas guru, pengembangan profesionalisme guru, dan kegiatan lainnya yang mencakup dari perencanaan pendidikan, pendanaan pendidikan dan penyelenggaraan sekolah itu sendiri.

D. Kesimpulan

Manajemen Berbasis Sekolah atau School-Based Management merupakan sebuah konsep manajemen di era otonomi daerah untuk meningkatkan mutu pendidikan. MBS perlu diterapkan untuk dijadikan solusi terhadap berbagai macam persoalan yang dihadapi sekolah. Oleh karena itu hasil dari pelaksanaan MBS di setiap sekolah tidak bisa sama. Tetapi semua sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sekolah yang berkualitas. Manfaat MBS antara lain mendorong profesionalisme kepala sekolah dan guru, lebih berkonsentrasi pada tugas, dan menjamin layanan pendidikan sesuai dengan tuntutan peserta didik dan masyarakat.

Konsep Manajemen Berbasis Sekolah ini pada hakikatnya dapat diterapkan di Sekolah yang kemudian menjadi istilah Manajemen Mutu Berbasis Sekolah (MMBM). Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah perlu diterapkan untuk dijadikan solusi terhadap berbagai macam persoalan yang dihadapi Sekolah . Sejauh penelusuran penulis rendahnya kualitas Sekolah disebabkan oleh adanya diskriminasi Sekolah, penyelenggaraan pendidikan yang birokrasi-sentralistik, ketidaktepatan kebijakan dan keputusan pemerintah terhadap peningkatan mutu Sekolah, dan adanya disharmoni antara Sekolah, pemerintah,dan masyarakat.

Melihat berbagai persoalan yang dihadapi Sekolah, tepat kirannya jika Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah diterapkan di Sekolah sebagai jawaban atas problem yang ada, dengan tetap berada di bawah kendali dan kontrol pemerintah pusat, sehingga tujuan pendidikan Sekolah akan tercapai, jika demikian maka Sekolah akan menjadi lembaga pendidikan Islam yang bermutu dan berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Adisel, & Prananosa, A. G. (2020). Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Sistem Manajemen Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19. ALIGNMENT: Journal of Administration and Educational Management, 3(1).

Adnan, Mohammad. (2019). Urgensi Penerapan Manajemen Pendidikan Islam Di Era Global. Munaqasyah: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pembelajaran

1(1): 77–112.

Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Sekolah. (2020). Pedoman Akreditasi Sekolah/Sekolah 2020.Jakarta: Kemendikbud.

Batubara, H. H., & Arian, D. N. (2017). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SDN Sungai Miai 5 dan SDN Surgi Mufti 4 di Banjarmasin. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 3(2), 452–461.

Hamid, H. (2018). Manajemen Berbasis Sekolah. Al-Khwarizmi: Jurnal Pendidikan Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, 1(1), 87–96.

Marsidin, S. (2019). Azas Legalitas Akreditasi. disdik.sumbarprov.go.id. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Mulyadi, Y., Iyep, C. H., & Tjeppy, S. (2021). Manajemen Berbasis Sekolah dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan. PPHK (Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan), 11(1).

Patras, Y. E., Agus, I., Papat, & Yulia, R. (2019). Meningkatkan Kualitas Pendidikan Melalui Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah dan Tantangannya. Jurnal Manajemen Pendidikan, 7(2).

Pratiwi, S. N. (2016). Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Sekolah. Jurnal EduTech, 2(1). Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan

Volume: 1 | Nomor 3 | Desember 2021 | E-ISSN: 2798-365X | DOI: 10.47709/educendikia.v1i3.1239177

Purwanto, N. A. (2016). Strategi dalam Menyiapkan dan Membina Kepala Sekolah. Jurnal Manajemen Pendidikan, 12(2), 49-54.

Saberan, R dan Erni, S. (2019). Penerapan manajemen berbasis sekolah. Lentera Jurnal Ilmiah Kependidikan, 14(2), 74-83.

Seriyanti, N., Syarwani, A., & Destiniar. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Peran Komite Sekolah terhadap Keberhasilan Manajemen Berbasis Sekolah. JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan), 6(1).

Sutisna, M. (2017). Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Relevansinya di Era Pendidikan Masa Kini. Biormatika Jurnal

Ilmiah FKIP Universitas Subang, 3(2).

Tahrun. (2020). Pengaruh Kemampuan Manajerial dan Motivasi Kepala Sekolah terhadap kualitas Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah. Jurnal Manajemen Pendidikan, 3(2), 124-135.